

LAPORAN
STUDIO AKHIR ARSITEKTUR

PERENCANAAN BLOK F DI PUSAT PEMERINTAHAN BARU KABUPATEN AGAM TUO
(DENGAN PEDEKATAN *HUMAN BEHAVIOR*)



Dosen Koordinator:

Ir. Nasril Sikumbang M.T
Duddy Fajriansyah S.T.,M.T

Dosen Pembimbing :

Ir. Elfida Agus. M.T
Dr. Jonny Wongso S.T., M.T

Disusun oleh:

Wanda Maharani
2110015111007

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024/2025



LAPORAN STUDIO AKHIR ARSITEKTUR

SEMESTER GENAP 2024/2025

JUDUL

**Perancangan Blok F di Pusat Pemerintahan Baru
Kabupaten Agam Tuo dengan Pendekatan *Human Behavior***

KETUA & WAKIL KOORDINATOR :

Ir. Nasril Sikumbang, M.T., IAI

Duddy Fajriansyah, S.T., M.T.

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Elfida Agus, M.T.

Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T.

MAHASISWA :

WANDA MAHARANI

2110015111007



PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024/2025 PADANG

**LEMBAR PENGESAHAN
STUDIO AKHIR ARSITEKTUR
SEMESTER GENAP TAHUN 2024-2025**

Judul :
**Perancangan Blok F di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo
dengan Pendekatan Human Behavior**

Oleh :
**WANDA MAHARANI
2110015111007**

Padang, 11 Agustus, 2025
Disetujui oleh :

Pembimbing I


**Ir. Elfida Agus, M.T.
(NIDN : 1007116202)**

Pembimbing II


**Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T.
(NIDN : 1003016901)**

Ketua Program Studi Arsitektur



**Ir. Nasril Sikumbang, M.T., IAI
(NIDN : 0003026302)**

Mengetahui :



Wakil Koordinator Studio Akhir Arsitektur


**Duddy Fajriansyah, S.T., M.T.
(NIDN : 1023068001)**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024/2025 PADANG**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR ARSITEKTUR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Maharani
Npm : 2110015111007
Program Studi : Arsitektur

Dengan sejujur-jujur-nya saya menyatakan bahwa hasil pekerjaan Studio Akhir Arsitektur dengan judul:

Perancangan Blok F di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo dengan Pendekatan Human Behavior

Merupakan hasil karya yang dibuat sendiri, bukan jiplakan dari Tugas Akhir atau karya tulis atau studio akhir arsitektur orang lain, dengan menjunjung tinggi kode - etik akademik di lingkungan ilmiah dan almamater, jika kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan di atas, penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkan-nya.

Padang, 11 Agustus 2025



Wanda Maharani

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studio Akhir Arsitektur dengan judul "Perencanaan Blok F di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo dengan Pendekatan *Human Behavior*"

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis telah menerima banyak dukungan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyusunan Studio Akhir Arsitektur tahun ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam laporan ini dan berharap untuk menerima masukan yang konstruktif dari dosen pembimbing agar laporan ini bisa lebih sempurna.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibuk Prof. Dr. Diana Kartika., sebagai Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibuk Dr. Ir. Haryani, MTP., sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
3. Bapak Ir.Nasril S. M.T., IAI. sebagai Ketua Program Studi Arsitektur.
4. Bapak Ir.Nasril S. M.T., IAI, dan Bapak Duddy Fajriansyah, S.T.,M.A., sebagai Dosen Koordinator Studio Akhir Arsitektur.
5. Ibu Ir. Elfida Agus M.T dan Bapak Dr. Jonny Wongso S.T., M.T sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini.
6. Staff Pengajar, selaku Dosen Penguji yang memberikan dukungan selama proses pembuatan laporan.
7. Bapak/Ibu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data penting sehingga membantu dalam penyusunan Laporan Studio Akhir Arsitektur.
8. Kepada diri saya sendiri, Wanda Maharani yang sudah berjuang menyelesaikan Laporan Studio Akhir Arsitektur hingga sampai pada detik ini.
9. Kepada Ibu saya Yulisma, dan Bapak saya Armen yang berperan penting dalam penyelesaian Laporan Seminar Arsitektur dengan selalu memberikan cinta, dukungan dan pengorbanan yang tiada henti baik secara finansial maupun emosional sehingga menjadi sumber motivasi dalam setiap perjalanan pendidikan saya.

10. Kepada Ayah saya Nasril, yang telah memberikan semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya.
11. Kepada kakak-kakak dan Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi yang membuat perjalanan hidup saya semakin berarti.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 yang saling mendukung dan membantu selama proses penyusunan laporan ini.

Sebagai hasilnya, penulis menyusun laporan ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei dan wawancara di lapangan. Penulis menyadari adanya banyak kesalahan dalam penyusunan dan penulisan laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi masyarakat serta bagi penulis sendiri sebagai referensi di masa mendatang. Amin Ya Rabbal'aalamin.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis

Wanda Maharani
2110015111007

ABSTRACT

Regional expansion is one form of regional autonomy that aims to improve development equity and public services. Agam Regency is planned to be expanded into a New Autonomous Region (DOB) called Agam Tuo Regency, which requires the construction of a new government center. This research focuses on the design of Block F as part of the government center using a Human Behavior approach, which is a design that considers user behavior, needs, and spatial interactions. The research methodology was conducted through literature studies, field surveys, primary and secondary data collection, as well as spatial needs analysis based on standards and activities of both employees and the community. The research results show that the design of Block F is not only functioning as a government office, but also as a workspace that supports collaboration, comfort, and public service efficiency. The Human Behavior approach produces a design that emphasizes openness, spatial flexibility, clear circulation, and user-friendly supporting facilities. In conclusion, the implementation of this concept is expected to improve the quality of regional government services, strengthen the identity of Agam Tuo Regency, and provide a more productive and humane work environment.

Keywords: *Regional expansion, Government center, Human Behavior, Architectural design.*

ABSTRAK

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Kabupaten Agam direncanakan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Agam Tuo, yang membutuhkan pembangunan pusat pemerintahan baru. Penelitian ini berfokus pada perancangan Blok F sebagai bagian dari pusat pemerintahan tersebut dengan pendekatan Human Behavior, yaitu perancangan yang memperhatikan perilaku, kebutuhan, serta interaksi pengguna ruang. Metode penelitian dilakukan melalui studi literatur, survei lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis kebutuhan ruang berdasarkan standar dan aktivitas pegawai maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain Blok F tidak hanya difungsikan sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang kerja yang mendukung kolaborasi, kenyamanan, serta efisiensi pelayanan publik. Pendekatan Human Behavior menghasilkan rancangan yang menekankan keterbukaan, fleksibilitas ruang, sirkulasi yang jelas, serta dukungan fasilitas pendukung yang ramah pengguna. Kesimpulannya, penerapan konsep ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah, memperkuat identitas Kabupaten Agam Tuo, serta memberikan lingkungan kerja yang lebih produktif dan manusiawi.

Kata kunci: Pemekaran wilayah, Pusat Pemerintahan, Human Behavior, Perancangan Arsitektur.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Isu dan Permasalahan	1
1.1.2 Data dan Fakta	2
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.2.1 Permasalahan Non Arsitektural	7
1.2.2 Permasalahan Arsitektural.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Sasaran Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.7 Ide Kebaruan.....	9
1.8 Keaslian Penelitian	9
1.9 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum	11
2.1.1 Pengertian Daerah Otonomi Baru (DOB)	11
2.1.2 Pengertian Pusat Pemerintahan	11
2.1.3 Deskripsi Kantor.....	11
2.1.4 Klasifikasi Bangunan Kantor.....	12
2.2 Tinjauan Teori.....	17
2.2.1 Teori Ruang	17
2.2.2 Standar Kebutuhan Ruang.....	18
2.3 Analisa MasterPlan	19
2.3.1 Analisa Kawasan	19
2.3.2 Konsep Kawasan	20

2.4 Tinjauan Tema	26
2.4.1 Pengertian <i>Eco-Office</i>	26
2.4.2 Pengertin <i>Human Behavior</i>	26
2.5 Review Jurnal	28
2.5.1 Jurnal	28
2.5.2 Kriteria Desain.....	33
2.5.3 Tanggapan	33
2.6 Review Preseden.....	34
2.5.1 Studi Preseden	34
2.5.2 Prinsip Desain.....	37
2.5.3 Tanggapan	37
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.1.1 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
3.1.2 Jenis Data.....	38
3.1.3 Sumber Data yang di Peroleh	39
3.2 Perancangan Penelitian	39
3.3 Jadwal Penelitian	39
3.4 Kriteria Lokasi	39
3.5 Lokasi Site	40
BAB IV.....	41
TINJAUAN KAWASAN PERENCANAAN	41
4.1 Deskripsi Kawasan	41
5.1.1 Potensi Kawasan.....	42
5.1.2 Permasalahan Kawasan	42
4.2 Deskripsi Tapak	42
4.2.1 Lokasi	42
4.2.2 Tautan Lingkungan.....	43
4.2.3 Ukuran dan Tata Wilayah.....	43
4.2.4 Peraturan.....	44
4.2.5 Kondisi Fisik Alami	44
4.2.6 Kondisi Fisik Buatan	44
4.2.7 Sirkulasi	45

4.2.8	Utilitas	46	6.2	Konsep Bangunan	78
4.2.9	Panca Indera	46	6.2.1	Konsep Massa Bangunan	78
4.2.10	Iklim.....	46	6.2.2	Konsep Ruang Dalam.....	78
4.2.11	Manusia dan Budaya.....	47	6.2.3	Konsep Struktur Bangunan.....	79
BAB V		48	6.2.4	Konsep Utilitas Bangunan.....	80
ANALISA.....		48	BAB VII		82
5.1	Analisa Ruang Luar	48	PERENCANAAN TAPAK.....		82
5.1.1	Analisa Pasca Indera terhadap Tapak.....	48	7.1	Site Plan	82
5.1.2	Analisa Iklim	49	BAB VIII		83
5.1.3	Analisa Aksesibilitas dan Sirkulasi	51	PENUTUP		83
5.1.4	Analisa Vegetasi Alami	52	8.1	Kesimpulan	83
5.1.5	Analisa Utilitas Tapak	53	8.2	Saran	83
5.1.6	Analisa <i>Superimpose</i>	54	Daftar Pustaka		84
5.1.7	Zoning Makro	54			
5.2	Analisa Ruang Dalam	55			
5.2.1	Data Fungsi.....	55			
5.2.2	Analisa Programatik	55			
5.2.3	Analisa Kebutuhan Ruang.....	56			
5.2.4	Analisa Besaran Ruang.....	62			
5.2.5	Analisa Hubungan Ruang.....	67			
5.2.6	Organisasi Ruang.....	69			
5.2.7	Zonning Mikro.....	70			
5.3	Analisa Bangunan	70			
5.3.1	Analisa Bentuk dan Massa Bangunan	70			
5.3.2	Analisa Struktur Bangunan.....	70			
5.3.3	Analisa Utilitas Bangunan	73			
BAB VI.....		76			
KONSEP PERANCANGAN		76			
6.1	Konsep Tapak	76			
1.1.1	Konsep Pancaindra Terhadap Tapak	76			
1.1.2	Konsep Iklim	77			
1.1.3	Konsep Aksesibilitas dan Sirkulasi	77			
1.1.4	Konsep Vegetasi Alami	78			
1.1.5	Konsep Utilitas	78			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Agam.....	3
Gambar 1. 2 Peta Pembagian Daerah Otonomi Baru.	3
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISPENDIKBUD	5
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISDUKCAPIL	6
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISPORA.....	7
Gambar 1. 6 Peta Kabupaten Agam.....	8
Gambar 2. 1 Kontur Kawasan Pusat Pemerintahan	19
Gambar 2. 2 Lokasi Kawasan Perencanaan	19
Gambar 2. 3 Pembagian Zona.....	21
Gambar 2. 4 Pembagian Blok Kawasan.....	21
Gambar 2. 5 Pola Bentuk Massa dalam Kawasan	22
Gambar 2. 6 Master Plan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Agam Tuo	24
Gambar 3. 1 : Perancangan Penelitian.....	39
Gambar 3. 2 : Lokasi Site	40
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Agam	41
Gambar 4. 2 Peta Nagari Balingka, Kabupaten Agam	41
Gambar 4. 3 Peta Nagari Balingka, Kabupaten Agam	41
Gambar 4. 4 Peta Blok E pusat pemerintahan	42
Gambar 4. 5 Peta Blok E pusat pemerintahan	42
Gambar 4. 6 Peta Tautan Lingkungan	43
Gambar 4. 7 Kondisi Fisik Alami Site.....	44
Gambar 4. 8 Kondisi Kontur Site.....	44
Gambar 4. 9 Potongan Kontur A-A	44
Gambar 4. 10 Potongan Kontur b-B	44
Gambar 4. 11 Kondisi Fisik Buatan Site.....	45
Gambar 4. 12 Kondisi Fisik Buatan diluar Kawasan.....	45
Gambar 4. 13 ,Sirkulasi Kawasan.....	45
Gambar 4. 14 Sirkulasi Primer.....	45
Gambar 4. 15 Sirkulasi Sekunder	45
Gambar 4. 16 Jalan Sicincin-Malalak	46
Gambar 4. 17 Sistem Utilitas	46
Gambar 4. 18 View Site.....	46
Gambar 4. 19 Kebisingan	46
Gambar 4. 20 Iklim	47
Gambar 5. 1 Analisa View.....	48
Gambar 5. 2 Analisa Kebisingan	48
Gambar 5. 3 Kesimpulan Analisa Pancaindra	49
Gambar 5. 4 Analisa Iklim.....	49
Gambar 5. 5 Analisa Penghawaan	50
Gambar 5. 6 Kesimpulan Analisa Iklim.....	51
Gambar 5. 7 Analisa Aksesibilitas dan Sirkulasi.....	51
Gambar 5. 8 Kesimpulan Aksesibilitas dan Sirkulasi.....	51
Gambar 5. 9 Peta Vegetasi.....	52
Gambar 5. 10 Bougenville	52

Gambar 5. 11 Vegetasi Ornamental.....	52
Gambar 5. 12 Pohon Cemara	52
Gambar 5. 13 Pohon Ansana	53
Gambar 5. 14 Green Roof.....	53
Gambar 5. 15 Pohon Tanjung	53
Gambar 5. 16 Sun Shading	53
Gambar 5. 17 Peta Utilitas	54
Gambar 5. 18 Utilitas Underground.....	54
Gambar 5. 19 Superimpose.....	54
Gambar 5. 20 Zoning Makro	54
Gambar 5. 21 SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55
Gambar 5. 22 SOTK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55
Gambar 5. 23 SOTK Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	56
Gambar 5. 24 Hubungan Ruang Primer DISPENDIKBUD	67
Gambar 5. 25 Hubungan Ruang Sekunder DISPENDIKBUD	67
Gambar 5. 26 Hubungan Ruang Penunjang DISPENDIKBUD	67
Gambar 5. 27 Hubungan Ruang Pelayanan DISPENDIKBUD.....	68
Gambar 5. 28 Hubungan Ruang Primer DISDUKCAPIL	68
Gambar 5. 29 Hubungan Ruang Sekunder DISDUKCAPIL	68
Gambar 5. 30 Hubungan Ruang Penunjang DISDUKCAPIL	68
Gambar 5. 31 Hubungan Ruang Pelayanan DISDUKCAPIL	68
Gambar 5. 32 Hubungan Ruang Primer DISPORA.....	68
Gambar 5. 33 Hubungan Ruang SEKUNDER DISPORA	69
Gambar 5. 34 Hubungan Ruang Penunjang DISPORA.....	69
Gambar 5. 35 Hubungan Ruang Pelayanan DISPORA	69
Gambar 5. 36 Organisasi Ruang lantai 1	69
Gambar 5. 37 Organisasi Ruang lantai 2	69
Gambar 5. 38 Organisasi Ruang lantai 3	70
Gambar 5. 39 Zoning Mikro DISPENDIKBUD.....	70
Gambar 5. 40 Bentuk dan Massa Bangunan	70
Gambar 5. 41 Pondasi	71
Gambar 5. 42 Sloof.....	71
Gambar 5. 43 Kolom.....	72
Gambar 5. 44 Partisi Dinding Kaca	72
Gambar 5. 45 Balok	72
Gambar 5. 46 Plat Lantai	72
Gambar 5. 47 Konstruksi Baja.....	73
Gambar 5. 48 Dak Beton	73
Gambar 5. 49 Listrik Underground.....	73
Gambar 5. 50 Titik Air Bersih	73
Gambar 5. 51 Sistem Plumbing	74
Gambar 5. 52 Sistem Kebakaran	74
Gambar 5. 53 Sistem Penangkal Petir.....	74
Gambar 5. 54 Sistem Keamanan.....	74
Gambar 5. 55 Tangga.....	75
Gambar 5. 56 Ramp	75

Gambar 6. 1 Konsep View	76
Gambar 6. 2 Konsep Kebisingan	77
Gambar 6. 3 Konsep Iklim.....	77
Gambar 6. 4 Konsep Aksesibilitas dan sirkulasi	77
Gambar 6. 5 Konsep utilitas.....	78
Gambar 6. 6 Konsep Massa	78
Gambar 6. 7 Konsep Kantor	79
Gambar 6. 8 Konsep R. Pelayanan	79
Gambar 6. 9 Pondasi Bore Pile	79
Gambar 6. 10 Kolom dan Balok	79
Gambar 6. 11 Baja	80
Gambar 6. 12 Listrik Bawah Tanah	80
Gambar 6. 13 Listrik Bawah Tanah	80
Gambar 6. 14 Sitem Kebakaran	80
Gambar 6. 15 Sitem Keamanan	81
Gambar 7. 1 Altenatif 1 Site Plan	82

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Wilayah Administratif Kabupaten Agam Tuo.....	3
Table 1. 2 Jumlah Fasilitas Pendidikan	3
Table 1. 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	3
Table 1. 4 Jumlah ASN berdasarkan OPD	4
Table 1. 5 Keaslian Penelitian	9
Tabel 2. 1 Standar Luas Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden	12
Tabel 2. 2 Standar Luas Ruang Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri	15
Table 5. 1 Analisa Aktivitas Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56
Table 5. 2 K Analisa Aktivitas Tamu Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57
Table 5. 3 Analisa Aktivitas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatam Sipil	58
Table 5. 4 Analisa Aktivitas Tamu Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	59
Table 5. 5 Analisa Aktivitas Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	60
Table 5. 6 Analisa Aktivitas Tamu Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.....	61
Table 5. 7 Besaran Ruang Ruang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62
Table 5. 8 Besaran Ruang Ruang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64
Table 5. 9 Besaran Ruang Ruang Kantor Dinas Pariwisata, pemuda, dan Olahraga	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah resmi diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia dari tahun 2001. Pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan langkah strategis dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri, kecuali untuk urusan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, meskipun otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkembang, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti ketidakmerataan pembangunan antar daerah, terutama antar daerah perkotaan dan perdesaan. Pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini. (Sari et al., 2023)

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang diharapkan dapat memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pemekaran daerah dianggap mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasca reformasi, kebijakan pemekaran wilayah semakin didominasi oleh proses politik dibanding proses teknokratis, yang berkaitan dengan keinginan daerah untuk memperoleh kekuasaan politik yang sebelumnya lebih dikuasai oleh pemerintahan pusat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, daerah diberikan peluang untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru, sehingga pemekaran daerah pasca reformasi didorong oleh kombinasi kebijakan desentralisasi, kepentingan politik lokal, dan upaya untuk mengejar pemerataan bangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Andik et al., n.d.). Beberapa faktor yang mendorong pemekaran wilayah antara lain sikap nasionalisme masyarakat, keberagaman etnis, dan ketidakadilan dalam pembagian hasil kekayaan negara. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk membentuk daerah otonom baru yang lebih fokus dalam mengelola potensi lokal.

Provinsi Sumatera Barat memiliki sejarah panjang terkait pemekaran daerah, yang dimulai sejak era kolonial Belanda dengan upaya memisahkan Minangkabau menjadi Minang Tuo dan Minang Mudo. Pasca-kemerdekaan, antara tahun 1945-1958, terjadi pemekaran beberapa daerah, termasuk Kabupaten Pasisir Selatan yang terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada masa orde baru, dibentuk Kota Madya Padang Panjang (1973) dan Kota Madya Bukittinggi (1983) dari Kabupaten Agam, serta pemekaran Kota Bukittinggi melalui Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999. Setelah reformasi 1998, tuntutan pemekaran meningkat, menghasilkan Kabupaten Dharmasraya (2003) dan Kabupaten Solok Selatan (2007), meskipun demikian, proses pemekaran tidak selalu mulus, menghadapi tantangan administratif, teknis, dan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek legalitas, kelayakan, dan kepentingan masyarakat dalam proses pemekaran yang terus berlangsung. (Unand, n.d.)

Tren terbaru menunjukkan bahwa karyawan kini lebih menghargai ruang yang mendukung kolaborasi, fleksibilitas, dan kesejahteraan mental. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai, serta mengurangi tingkat stres. Oleh karena itu, penerapan konsep *Human Behavior* menjadi sangat relevan dengan mempertimbangkan perilaku manusia di lingkungan kerja sangat dipengaruhi oleh desain ruang yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung interaksi sosial dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja. Dengan mempertimbangkan perilaku manusia, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana desain ruang yang responsif dapat meningkatkan kepuasan pegawai di kantor dinas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Blok F Di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Dengan Konsep Human Behavior”

1.1.1 Isu dan Permasalahan

Sejak tahun 1990 banyak sekali aspirasi masyarakat kabupaten Agam mengenai pemekaran kabupaten Agam, aspirasi itu sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di beberapa kecamatan termasuk kecamatan IV koto, kecamatan malalak, kecamatan baso, kecamatan sungai pua, kecamatan candung dan beberapa kecamatan lainnya. Selain itu, jauhnya akses menuju ke pusat pemerintahan kabupaten Agam yang ada di Lubuk Basung menjadi keluhan bagi masyarakat sehingga banyak aspirasi muncul mengenai pemekaran kabupaten Agam ini. (Yusrizal, 2024). Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki potensi untuk dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten Agam berada di Geografis wilayah yang

cukup luas, sehingga masyarakat Agam yang berada di bagian ujung Kabupaten Agam, mengurus segala kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan ke daerah Lubuk Basung. (DPDR Smbar, 2024)

Pembentukan DOB yang akan dinamakan Kabupaten Agam Tuo. Semua persyaratan yang diperlukan telah diajukan oleh Bupati Kabupaten Agam, dan saat ini tinggal menunggu tanggapan dari Pemerintah Provinsi serta Gubernur Sumatera Barat. Jika pemekaran ini terwujud, ibukota kabupaten baru akan berlokasi di Kecamatan IV Koto, yang akan memerlukan pembangunan pusat pemerintahan baru, termasuk rencana pembangunan Kantor Bupati untuk DOB Agam Tuo. (Muhammad Fadillah, 2024)

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan DOB Agam Tuo. Diharapkan, dengan adanya kabupaten baru ini, pelayanan kepada masyarakat yang tertinggal di Kabupaten Agam dapat ditingkatkan secara signifikan. Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sawal, menyatakan dalam pertemuan dengan Bupati Agam, Andi Warman, pada Jumat (4/5/2024), bahwa rencana pembentukan DOB Agam Tuo telah lama diusulkan namun belum ditindaklanjuti. Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Andi Warman, rencana tersebut kembali diangkat dan diharapkan dapat segera direalisasikan. Untuk mempercepat proses pemekaran Agam Tuo, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Dr. Novi Irwan, S.Pd, M.M, bersama Komisi I DPRD Agam, melakukan kunjungan kerja untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (18/7). Pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Agam, Aderia, SP, MM, Wakil Ketua Komisi I Ridwan Suhaili, M.Ed, Sekretaris Komisi M. Ater Dt. Manambun, serta anggota dan sekretariat DPRD Agam. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Agam menyampaikan terima kasih atas sambutan positif Gubernur terhadap pemekaran Agam Tuo, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan memajukan masyarakat. (Humas DPRD Agam, 2024)

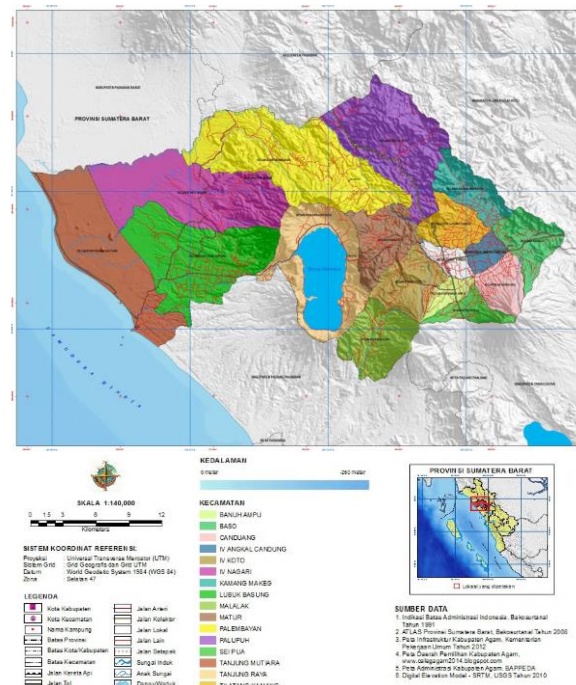
Dipandang dari sisi pemerintahan dengan wilayah yang lebih kecil, pemekaran wilayah dapat memberikan dan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dalam pembentukan sistem pemerintah, yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan terbentuknya Kabupaten Agam Tuo, diharapkan dapat memberikan akses terhadap pelayanan di bidang

pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan publik dapat ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang merata. (Diskominfo, 2024). Dengan terbentuknya ibukota Kabupaten Agam Tuo di kecamatan IV Kota, maka dibutuhkannya pusat pemerintahan yang akan mengelola dan menunjang pelayanan bagi masyarakat di pusat pemerintahan daerah otonomi baru.

1.1.2 Data dan Fakta

Dikutip dari Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 22 agustus 2024 sekreataris daerah kabupaten Agam, Drs. H. Edi Busti, M.Si menjelaskan urgensi dalam pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberi nama “Agam Tuo” yang dihadiri Organinasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten, kemudian di sahkan dengan ditanda tangani kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Agam dan Bupati Agam di dalam Ruang Sidang Utama DPRD Agam. Dan dibahas dengan perwakilan daerah ditingkat provinsi dan gubernur, kemu dian akan diajukan ditingkat DPD RI, DPR RI atau pemerintah pusat. (Altas Maulana, 2024).

Secara geografis, Kabupaten Agam berada dikawasan yang sangat strategis, berada di kawasan yang tinggi akan daya saing dalam ekonomi karena berada di jalur pelintasan Tengan Sumatera dan Jalur Lintas Barat sumatera. Kabupaten Agam memiliki luas wilayah 2.264,89 km2 dan terletak pada titik 00° 01' 34”- 00° 28' 43”LS dan 99° 46' 39”-100° 32' 50”BT. (UIN Suska Riau, n.d.).



Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Agam.
Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Agam, 2024

Berdasarkan data registrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Agam adalah 532,180 jiwa, laki-laki sebanyak 266,369 jiwa atau 50,14%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 265,811 jiwa atau 49,86%. Dengan adanya pemekaran Kabupaten Agam maka akan terbentuk wilayah administratif baru yang akan menjadi wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo, dalam peta Kabupaten Agam dipecah dalam beberapa kecamatan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Peta Pembagian Daerah Otonomi Baru.
Sumber : https://www.instagram.com/langgam.id/p/C4zeGJxrOSZ/?img_index=1

Berikut merupakan tabel yang akan menjadi wilayah administratif Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo dengan jumlah penduduk yang tertera

Table 1. 1 Wilayah Administratif Kabupaten Agam Tuo

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Tilatang Kamang	95,86 Km2	37.494 Jiwa
2	Baso	70,3 Km2	37.518 Jiwa
3	Canduang	52,29 Km2	25.485 Jiwa
4	Sungai Pua	37,83 Km2	27.179 Jiwa
5	Ampek Angkek	30,66 Km2	44.949 Jiwa
6	Banuhampu	28,48 Km2	38.244 Jiwa
7	Palupuah	235,34 Km2	15.525 Jiwa
8	Malalak	104,49 Km2	10.654 Jiwa
9	Kamang Magek	99,61 Km	22.181 Jiwa
10	IV Koto	68,72 Km2	26.380 Jiwa
Jumlah			285.609 jiwa

Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Agam, 2024

Jumlah fasilitas-fasilitas yang termasuk kedalam daerah calon otonomi baru Kabupaten Agam tuo, diantaranya terdapat fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya:

Table 1. 2 Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Kecamatan	Pendidikan 2023/2024			
		TK/RA	SD/MI	SMP/Mts	SMA/MA
1	Tilatang Kamang	20	27	10	9
2	Baso	29	29	8	5
3	Canduang	22	18	8	4
4	Sungai Pua	10	15	6	3
5	Ampek Angkek	31	32	11	6
6	Banuhampu	15	25	6	5
7	Palupuah	18	19	5	1
8	Malalak	13	13	3	0
9	Kamang Magek	16	23	6	5
10	IV Koto	17	23	5	5
Jumlah		191	224	68	43

Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Agam, 2024

Dalam pemekaran wilayah pusat pemerintahan baru, fasilitas kesehatan yang sudah tersedia dalam wilayah yang termasuk administrasi baru kabupaten Agam Tuo, sebagai beriku:

Table 1. 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Kecamatan	Puskesmas
1	Tilatang Kamang	1
2	Baso	1
3	Canduang	1
4	Sungai Pua	1
5	Ampek Angkek	1
6	Banuhampu	1
7	Palupuah	0
8	Malalak	1
9	Kamang Magek	1
10	IV Koto	1
Jumlah		

Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Agam, 2024

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah elemen utama yang menggerakkan pemerintahan. PNS dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat, dan instansi tempat mereka bekerja. Berikut adalah daftar-daftar unit pelayanan Kabupaten Agam yang tertera dalam profil instansi Pemerintahan Kabupaten Agam.

Table 1. 4 Jumlah ASN berdasarkan OPD

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun			
		2019/ 2020	2021	2022	2023/ 2024
1	Sekretariat Daerah	98	100	108	97
2	Sekretariat DPRD	23	22	22	21
3	Inspektorat	41	51	56	58
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	33	29	30	26
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	42	43	41	25
6	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	19
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30	33	40	35
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	19	20	17
9	Badan Penanggulangan Bencana daerah	33	28	29	30
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153	123	104	102
	SLTP	963	875	780	680
	SD dan TK	2853	2718	2575	2416
	SKB Lasi	10	8	7	4

11	Dinas Kesehatan	63	55	52	66
12	Puskesmas	763	730	841	796
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	73	68	69	70
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	44	35	32
15	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	23	24	24	27
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	6
17	Dinas Lingkungan Hidup	38	36	30	31
18	Dinas Pertanian	133	125	123	111
19	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Ketenagakerjaan	36	32	31	19
20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	42	36	37	32
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	21	23	26	24
22	Dinas Sosial	19	21	20	20
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	26	27	22
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	90	84	84	76
25	Dinas Perhubungan	36	36	31	28
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	30	26	22
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	20	20	20	19
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	18	21	19
29	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12	25	30	27
30	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	14	22	261	253
31	Tanjung Mutiara	12	9	11	10
32	Lubuk Basung	12	16	19	14
33	Ampek Nagari	11	12	14	15
34	Tanjung Raya	18	16	17	15
35	Matur	15	11	10	9
36	IV Koto	9	10	9	8
37	Malalak	8	9	11	7
38	Banuhampu	19	16	14	12

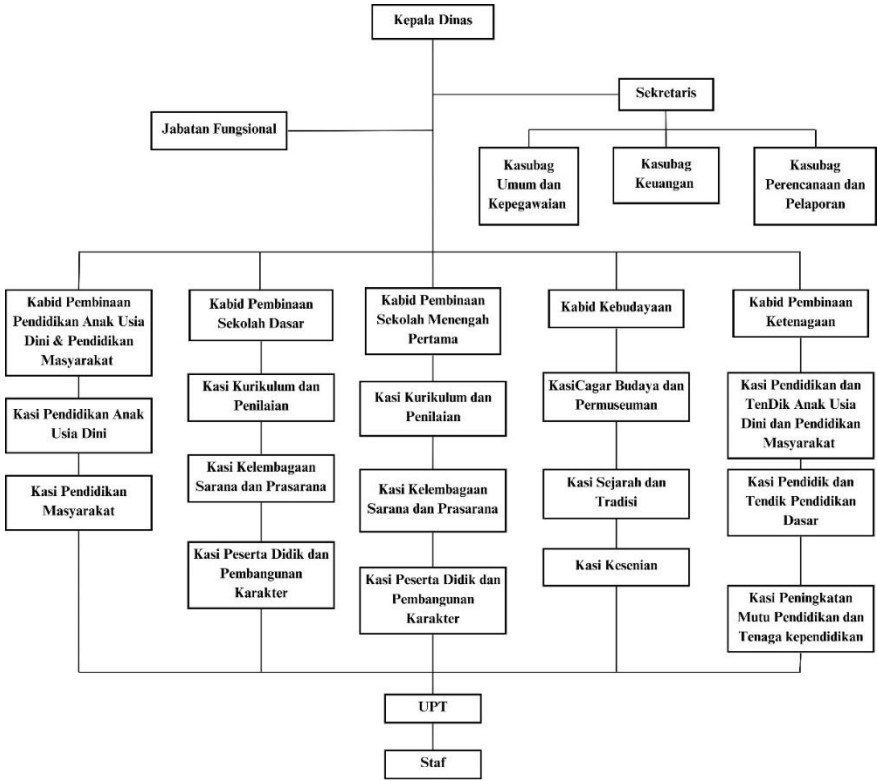
39	Sungai Pua	17	15	13	11
40	Ampek Angek	23	18	15	15
41	Canduang	19	15	13	10
42	Baso	15	13	11	11
43	Tilatang Kamang	22	22	18	13
44	Kamang Magek	12	13	15	13
45	Palembayan	14	9	10	9
46	Palupuh	14	12	12	10
47	PNS Tubel, Proses Penempatan, dan diperuntukan	-	-	-	-
JUMLAH		6.050	5.720	5.812	5.412
Terjadi penurunan jumlah pegawai dari tahun 2019/2020 hingga 2023/2024 sebesar 10,54%					

Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Agam, 2024

Pembagian pegawai dalam konteks pemekaran daerah diatur dalam PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman pengalihan personel dari daerah induk ke daerah otonom baru (DOB). Pengaturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan pegawai dari perangkat daerah yang dilikuidasi atau digabung ke struktur baru. Proses ini memperhatikan berbagai aspek seperti kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman kerja pegawai. Koordinasi antara pemerintah daerah induk dan DOB menjadi kunci kelancaran proses pengalihan, dengan tetap memperhatikan hak-hak kepegawaian seperti gaji dan tunjangan. Pengaturan yang sistematis ini bertujuan mendukung efektivitas pemerintahan baru sambil mempertahankan kualitas layanan publik. Dalam perencanaan Blok F dalam pusat pemerintahan baru Kabupaten Agam, terdiri dari tiga instansi pemerintahan, diantaranya :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di sektor Pendidikan. Dinas ini memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah terkait Pendidikan dan kebudayaan, berlandaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendidikan berperan mengelola semua aspek yang berkaitan dengan Pendidikan, sedangkan dinas kebudayaan bertugas mengatur dan menjaga pelestarian kebudayaan.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISPENKIBUD

+Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

6. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

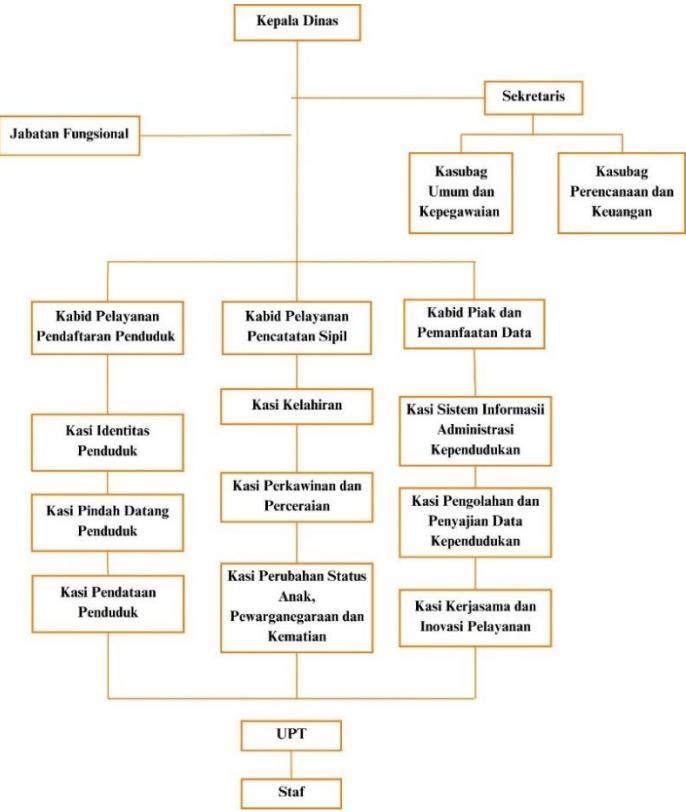
- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. Seksi Sejarah dan Tradisi;
- c. Seksi Kesenian.

7. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- c. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan serta pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Tugas utama dari Dinas ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan yang akurat, penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP), dan akta kelahiran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan, selain itu, Dukcapil juga berperan dalam sosialisasi pentingnya data kependudukan bagi Pembangunan daerah dan negara.



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISDUKCAPIL
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

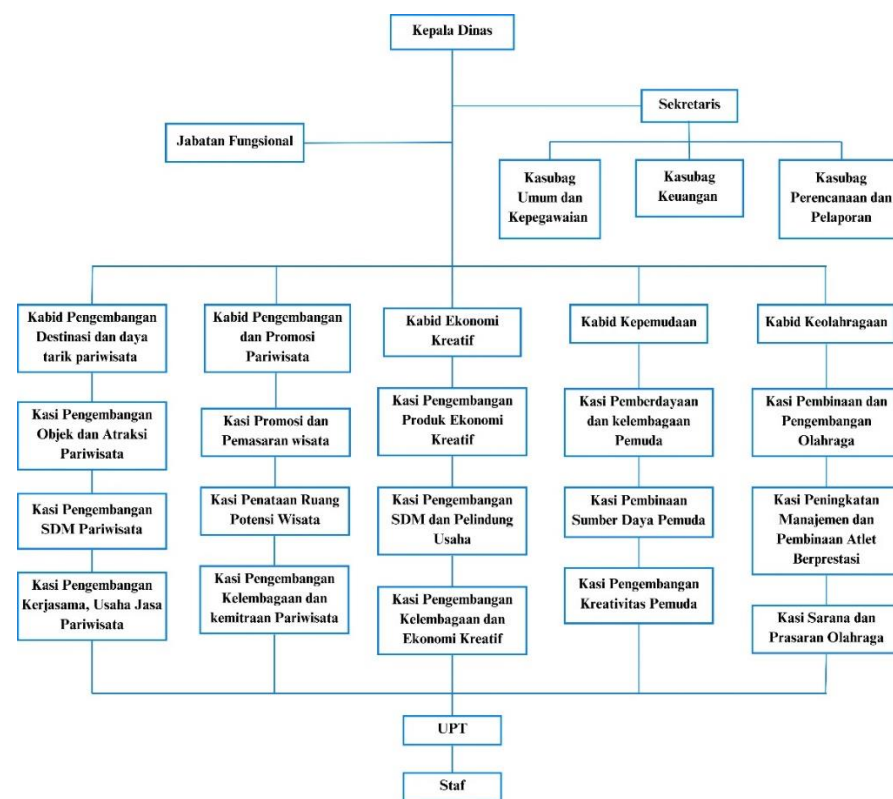
Dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang elayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

c. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan sektor pariwisata, pembinaan pemuda, serta pengelolaan kegiatan olahraga di suatu daerah. Tugas utama dari dinas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata, memfasilitasi kegiatan kepemuda, serta mengembangkan potensi olahraga di masyarakat.



Gambar 1. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISPORA
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2024

Dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- c. Seksi Pengembangan Kerjasama, Usaha Jasa Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata.

4. Bidang engembangan dan Promosi Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
- b. Seksi Penataan Ruang Potensi Wisata;
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.

5. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Ekonomi Kreatif.

6. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :

- a. Seksi emberdayaan dan Kelembagaan Pemuda;
- b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Pemuda;
- c. Seksi Pengembangan Kreativitas Pemuda.

7. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. Seksi Peningkatan Manajemen dan Pembinaan Atlet Berprestasi;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Permasalahan Non Arsitektural

1. Bagaimana pola aktivitas dan kegiatan kerja pegawai yang perlu diwadahi dalam kantor dinas?
2. Bagaimana membuat kantor dinas di Blok F yang sesuai dengan peraturan pemerintahan dengan perilaku pegawai?

3. Bagaimana menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas, serta mengurangi stres di antara karyawan dalam konteks perencanaan kantor?

1.2.2 Permasalahan Arsitektural

1. Bagaimana menciptakan fleksibilitas ruang yang komprehensif dan terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perencanaan Kantor Dinas dengan konsep *Human Behavior* ?
2. Bagaimana merancang kantor dinas di Blok F didalam masterplan pusat pemerintahan dengan mempertimbangkan segala aspek terhadap pegawai?
3. Bagaimana mengintegrasikan elemen-elemen alam dan buatan dalam desain kantor untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik karyawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk merencanakan Blok F dalam Master Plan Pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan dinas pariwisata pemuda dan olahraga di Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan konsep *Human Behavior* yang bertujuan menganalisis pengaruh desain ruang terhadap perilaku pegawai, lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental, dan mengintegrasikan elemen fisik yang mendorong interaksi sosial. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan blok F dapat menjadi contoh perencanaan kantor dinas yang fungsional dan berorientasi pada perilaku manusia.

1.4 Sasaran Penelitian

Terciptanya hasil rancangan Blok F dalam MasterPlan pusat pemerintahan di Kabupaten Agam Tuo. Mendesain bangunan yang dapat mewadahi segala aktifitas untuk kebutuhan pelayanan masyarakat kabupaten Agam Tuo di kecamatan IV Koto dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Dengan menerapkan konsep *Human Behavior*, sasaran ini juga mencakup fasilitas sesuai standar, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung interaksi sosial antar karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mental pegawai.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini, ialah dapat digunakan sebagai referensi studi terkait perencanaan Blok F dalam MasterPlan pusat pemerintahan dengan konsep *Human Behavior*, yang mengedepankan kebutuhan pengguna dalam desain kantor dinas. Diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan konsep lingkungan kerja yang ramah pengguna dan sesuai standar peraturan yang ada.

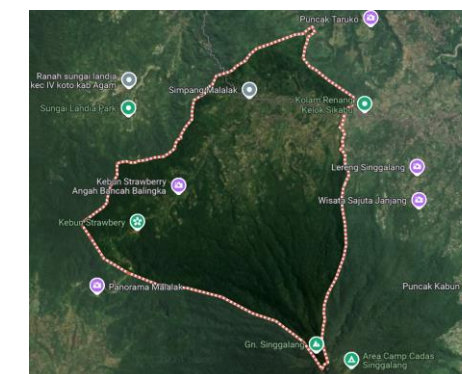
1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan ialah sebagai arahan rekomendasi untuk perancangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo, terutama untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan dinas pariwisata pemuda dan olahraga dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi kenyamanan, dan keamanan.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

1.6.1 Ruang Lingkup Special (Kawasan)

Ruang lingkup kawasan penelitian berada di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 6 Peta Kabupaten Agam
Sumber : Google Earth, 2024

Batasan Nagari Balingka :

Utara : Jorong Koto Hilalang
Selatan : Nagari Malalak
Timur : Nagari Tanjung Sari

Barat : Nagari Pahambatan

1.6.2 Ruang Lingkup Substansi (Kegiatan)

Ruang lingkup substansi merupakan kegiatan yang membantu mewujudkan pendekatan dalam perencanaan kantor di Blok F dalam MasterPlan pusat pemerintahan dengan mempertimbangkan segala aspek, seperti mencari isu-isu dan literatur untuk mendapatkan data tentang lokasi, terkait dengan potensi, permasalahan, serta mencari literatur dan preseden arsitektur sebagai acuan, kemudian menganalisis untuk mendesain konsep yang sesuai dengan peraturan yang ada.

1.7 Ide Kebaruan

Ide kebaruan dari penerapan konsep *Human Behavior* untuk kantor dinas terletak pada integritas antara kebutuhan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi melalui desain yang adaptif. Konsep overlapping spaces digunakan untuk menciptakan area pelayanan terpadu yang transparan, tetapi tetap menjaga privasi, dengan zonasi yang jelas antar area publik dan privat untuk mengoptimalkan sirkulasi dan keamanan. Desain ini juga mempertahankan hierarki struktural pemerintahan melalui pembagian ruang yang mencerminkan wibawa namun tetap fleksibel. Selain itu, penerapan teknologi smart office yang terintegrasi mendukung pelayanan yang efisien, sedangkan elemen-elemen civic design dan budaya lokal memperkuat identitas institusi. Semua ini dirangkum dalam konsep universal design untuk mengakomodasikan seluruh lapisan masyarakat, sehingga menghasilkan kantor kantor dinas yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga humanis dan inklusif dalam memberikan pelayanan publik.

1.8 Keaslian Penelitian

Table 1. 5 Keaslian Penelitian

No.	Universitas/ Tugas Akhir	Nama	Tahun	Judul	Pembahasan
1.	Universitas Bung Hatta http://repo.bunghatta.ac.id/21584/	Hafizatul Hisni	2024	Perancangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang (Pendekatan Collaborative Landscape Office)	Perancangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menerapkan pendekatan Collaborative Landscape Office. Penelitian ini berfokus pada standar pelayanan kantor pemerintah, dengan tujuan menyediakan fasilitas umum yang mendukung aktivitas di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah ketiadaan kantor permanen bagi dinas tersebut.
2.	Universitas Negeri Gorontalo https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jja/article/view/17427	Irmawati	2022	Perancangan Kantor Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular	Penelitian ini bertujuan untuk merancang Kantor Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang memenuhi standar perkantoran dan kebutuhan pengguna. Saat ini, kantor tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai dan desain yang representatif, sehingga mengganggu kenyamanan kerja pegawai serta pelayanan tamu. Untuk mengatasi masalah ini, perancangan dilakukan dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular yang menekankan kebutuhan pengguna sambil tetap memperhatikan estetika bangunan. Penataan ulang ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi kantor sebagai bagian dari pembangunan kota dan mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Gorontalo.

Sumber : Repository Bung Hatta, 2024

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami, penulisan tugas penelitian ini yang diperoleh dari mata kuliah Seminar Arsitektur nantinya akan disusun sesuai rangkaian kegiatan yang dibagi menjadi beberapa Bab dan Sub Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup topik utama yang berkaitan dengan judul penelitian, serta isu dan fakta yang relevan dengan topik tersebut. Dalam penelitian ini, rumusan masalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu masalah non-arsitektural dan arsitektural. Tujuan serta sasaran penelitian ditetapkan untuk memberikan arah yang jelas bagi studi yang dilakukan. Ruang lingkup pembahasan meliputi: ruang lingkup spasial yang mencakup kawasan, serta ruang lingkup substansial yang berhubungan dengan jenis kegiatan yang dianalisis dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat data dan teori yang berkaitan dengan judul, termasuk rangkuman dari jurnal-jurnal relevan yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Uraian ini mencakup tinjauan pustaka yang dapat diambil dan bersumber dari media cetak, seperti buku dan koran, serta media elektronik, seperti jurnal ilmiah terkait.

BAB II METODE PENELITIAN

Memuat tentang metode penelitian dan metode perancangan yang akan digunakan.

BAB IV TINJAUAN KAWASAN PERANCANGAN

Berisi hasil survei yang mencakupi data primer dan sekunder, serta temuan lapangan, termasuk analisis kawasan secara makro dan mikro, dilengkapi dengan adanya dokumentasi maupun wawancara.

BAB V ANALISA

Bab ini membahas analisa tapak dari survei lapangan, meliputi evaluasi ruang luar, ruang dalam, bangunan dan lingkungan.

BAB VI KONSEP PERANCANGAN

Bab ini membahas gagasan konsep yang akan ditetapkan, mencakup konsep tapak, bangunan dan arsitektur.

BAB VII PERENCANAAN TAPAK

Bab ini membahas perencanaan tapak berdasarkan analisis dan konsep yang dijelaskan sebelumnya.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari latar belakang penelitian hingga perencanaan tapak.